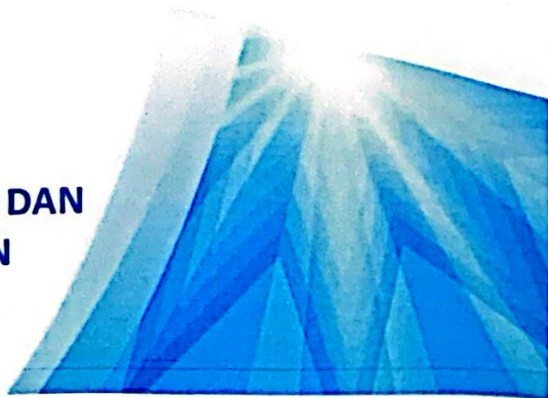


2023

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PIDIE**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie Tahun 2023 sebagai bahan pengukuran dan penilaian kinerja dalam melaksanakan kegiatan serta mengukur sejauh mana strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie sekaligus sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas dan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie kami buat, harapan kami semoga laporan kinerja ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat secara internal sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen dan kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan kinerja yang optimal.

Sigli, 16 Januari 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Pidie

Thantawi, ST
Pembina Tk. I /Nip. 19741030 200604 1 003

DAFTAR ISI

SK KEPALA DINAS	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie	2
1.4 Sumber Daya Aparatur	5
1.5 Isu Strategis	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
2.1 Perencanaan Kinerja	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	8
2.1.2 Program dan Kegiatan	9
2.2 Indikator Kinerja	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja	14
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	14
3.2.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	15
3.2.2 Capaian Target RPD	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	26
3.3 Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV PENUTUP.....	34
REFERENSI	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat dalam tata kelola pemerintahan, laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian, tantangan, dan arah ke depan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Pidie selama satu tahun anggaran.

Laporan LKjIP Tahun 2023 ini dilakukan dengan mengukur kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pencapaian sasaran yang tertera dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pidie 2023-2026. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Melalui pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam merespon Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.2 DASAR HUKUM

Pedoman peraturan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Pidie adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PIDIE

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Pidie merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pidie Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie.

Dinas PRKP Kabupaten Pidie mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan tugas perbantuan yang diberikan oleh daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas PRKP Kabupaten Pidie mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta Pengembangan Kawasan Permukiman;
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.
4. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
5. Pelaksanaan perencanaan terhadap bangunan gedung dan lain-lain.



6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Perumahan.
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi perumahan, kawasan permukiman, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Sekretariat, terdiri dari:

- Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Perlengkapan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

c. Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan

Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang perencanaan penyediaan perumahan, bina penataan bangunan dan pemeliharaan gedung.

d. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

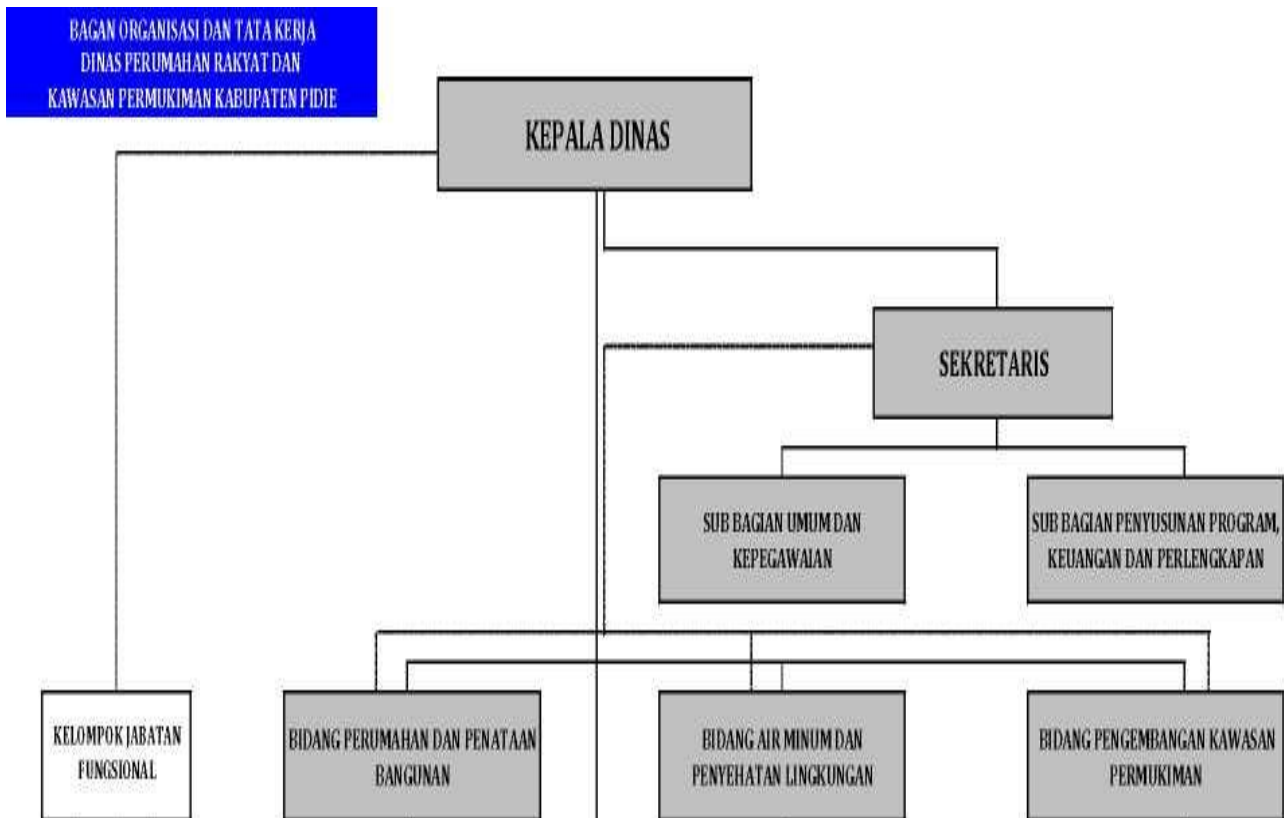
Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan sistem penyediaan air minum.



e. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, kebijakan pengelolaan dan pembinaan di bidang penataan kawasan permukiman dan prasarana lingkungan.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023;



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023;



1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kawasan permukiman, maka Dinas PRKP Kab. Pidie didukung oleh potensi sumber daya aparatur sebanyak 82 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah ASN Dinas PRKP tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	39
2	Non ASN	40
	Total	79

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan tahun 2023

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	1	3
4	Kepala Subbag	-	-	2	-	2
5	Staf	1	2	28	2	32
	Jumlah	1	2	31	5	39

Tabel 1.3 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	6
2	Sarjana (S-1)	17
3	Diploma (D-4/D-3)	1
4	SMA	14
5	SMP	1
	Jumlah	39



Tabel 1.4 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Pria	30
2	Wanita	9
	T o t a l	39

1.5 ISU STRATEGIS

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu Sektor Perumahan dan penataan bangunan, Sektor Air Minum dan Sanitasi; dan Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman. Untuk mendapatkan penanganan yang tepat terhadap permasalahan yang ada di setiap sektor perlu diidentifikasi permasalahan dan menjadikan permasalahan-permasalahan tersebut sebagai isu-isu strategis, sehingga dapat dirumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat sasaran. Adapun permasalahan ataupun isu strategis untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masih rendah.
2. Relokasi dan pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana.
3. Minimnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada suatu kawasan sehingga mengakibatkan tata letak bangunan rumah tidak teratur dan kesulitan dalam pengawasan IMB.
4. Penyediaan sanitasi yang layak.

Upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sanitasi dan MCK untuk mewujudkan permukiman lingkungan yang sehat adalah salah satu misi bidang Air Minum dan Penyehatan Masyarakat. Peningkatan pembangunan tangki septik individual, Tangki Septik komunal, MCK serta pemeliharaan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (IPLT).

5. Penyediaan akses air minum yang layak

Pembangunan infrastruktur untuk memenuhi target 100% akses air minum layak melalui pembangunan SPAM, peningkatan idle capacity, pembangunan jaringan air minum dan penambahan sambungan rumah masyarakat.



6. Penanganan daerah kumuh perkotaan

Kawasan kumuh adalah kawasan yang membutuhkan penanganan multisektoral yaitu penanganan banyaknya rumah tidak layak huni, buruknya sanitasi, tingginya kepadatan penduduk, dan sulitnya akses terhadap air bersih. Penanganan daerah kumuh perkotaan dimaksudkan untuk merubah wajah kota menjadi kawasan yang humanis dan tertata melalui kegiatan revitalisasi dan peremajaan kawasan.

7. Penanganan masalah drainase perkotaan

Pada umumnya drainase di suatu kawasan dalam kota dibuat secara terintegrasi, yang mana antara drainase suatu kawasan ke kawasan tertentu saling terhubung dan terkait dalam suatu jaringan drainase. Sehingga tak heran, pembangunan sistem drainase perkotaan ini sangat kompleks yang disertai banyak komponen-komponennya. Pembangunan drainase kota juga membutuhkan peningkatan dan pemeliharaan secara berkala.

8. Pembangunan PSU kawasan permukiman

Masih minimnya upaya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) terutama pada kawasan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan yang menyebabkan penurunan kualitas hunian.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui beberapa kegiatan tahunan yang hendak dicapai. Komponen Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie sesuai dengan Renstra Dinas tahun 2023 - 2026 Aceh.

Tujuan 1: Meningkatkan pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana

Sasaran:

- a. Terpenuhinya sanitasi yang layak bagi masyarakat
- b. Terpenuhinya penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat
- c. Tertanganinya kawasan permukiman kumuh
- d. Terpenuhinya saluran permukiman yang baik
- e. Tertatanya bangunan gedung sesuai fungsi dan aturan
- f. Tertatanya bangunan dan lingkungannya
- g. Terpenuhinya syarat-syarat perumahan layak huni
- h. Terlaksananya identifikasi/relokasi/rehab/pembangunan baru rumah korban bencana
- i. Meningkatnya PSU di kawasan perumahan untuk menunjang fungsi hunian
- j. Meningkatnya kualitas permukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai
- k. Terlaksananya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pidie

Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pidie



Tabel. 2.1 Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana	Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman dan infrastruktur pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pembangunan rumah layak huni 2. Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani 3. Persentase tertanganinya saluran drainase dalam kondisi baik 4. Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU 5. Persentase kawasan permukiman yang tertata 6. Persentase Rumah tinggal dengan sanitasi layak 7. Persentase rumah tangga dengan air minum layak

2.1.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi. Adapun program dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 sebanyak 11 (sebelas) program yang terdiri dari;

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM;

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.



2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota, terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategis serta Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat skala permukiman.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
4. Program Pengembangan Permukiman
Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Insfrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis daerah Kab/Kota.
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian IMB dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/kota.
7. Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pendataan penyediaan dan Rehabilitasi/rekolasi Rumah Korban Bencana; Pembangunan dan Rehabilitasi



Rumah Korban Bencana dan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).

8. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, terdiri dari sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pendataan serta verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.

9. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan perbaikan Rumah tidak Layak Huni.

10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, terdiri dari sub kegiatan Penyediaan PSU di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian.

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota



2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	KET.
1.	Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman dan infrastruktur pelayanan dasar Meningkatkan	Persentase pembangunan rumah layak huni	$\frac{\text{Jlh. RLH yang dibangun}}{\text{Jlh total rumah}} \times 100\%$	Sesuai PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017	
		Persentase rumah tangga dengan air minum layak	$\frac{\text{Jlh. Penduduk berakses air minum layak}}{\text{Jlh.penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	Sesuai PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017	
		Persentase tertanganinya saluran drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang saluran yg tertangani}}{\text{Total Panjang darainase}} \times 100\%$	Sesuai PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017	
		Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	$\frac{\text{Jumlah Kawasan permukiman yg didukung PSU}}{\text{Jumlah kaw. Permukiman}} \times 100\%$	Sesuai PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017	
		Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	$\frac{\text{Luas Kawasan kumuh yg tertangani}}{\text{Total luas kaw. Kumuh}} \times 100\%$	Sesuai PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017	
		Persentase kawasan permukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100\%$	Sesuai PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017	
		Persentase Rumah tinggal dengan sanitasi layak	$\frac{\text{Jlh. Rumah berakses sanitasi}}{\text{Total jlh rumah}} \times 100\%$	Sesuai PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017	



2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja. Dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie menyusun Perjanjian Kinerja 2023 dengan Sasaran Strategis meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan infrastruktur pelayanan dasar.

Sebagai tolak ukur sasaran strategis, ditetapkan beberapa indikator kinerja yang ditargetkan sesuai dengan Renstra Dinas PRKP 2023-2026, sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2023:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana	1. Persentase pembangunan rumah layak huni	1%
	2. Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0,6%
	3. Persentase tertanganinya saluran drainase dalam kondisi baik	3%
	4. Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	5%
	5. Persentase kawasan permukiman yang tertata	5%
	6. Persentase Rumah tinggal dengan sanitasi layak	1%
	7. Persentase rumah tangga dengan air minum layak	2%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat keberhasilan atau kegagalan tersebut tidak berorientasi pada anggaran (input) atau kegiatan (output) saja, akan tetapi juga berorientasi pada hasil (outcome). Sehingga keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kesuksesan dalam menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana semata, tetapi juga oleh manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdernya.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau output dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan yaitu membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran.



3.1.1 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini diarahkan pada terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan sarana prasarana aparatur dalam menunjang kinerja perencanaan pembangunan daerah, perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tersedia Dokumen Perencanaan SKPD
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tersedia Dokumen RKA SKPD
3	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tersedia Dokumen DPA SKPD
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100	Tersedia Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 org/bln	48 org/bln	96	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan
2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tersedianya Informasi Pegawai
2	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Dokumen	100	Tersedianya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai



e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia
2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Bahan Logistik Kantor tersedia
4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Barang Cetak dan Penggandaan tersedia
5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	100	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
6	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Tersedianya Paket Bahan Material yang Disediakan
7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diadakan
8	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Adanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Paket Mebel yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	100	Tersedianya Paket Mebel
2	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100	Tersedianya Jasa Surat Menyurat
2	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik tersedia
3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor



h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 unit	100	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan terpelihara
2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 unit	100	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
3	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

2. **Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM**

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air minum, air bersih/sumur bor untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat wajib dipenuhi, seperti air minum, masak, mandi, dan lain-lain.

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/kota

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	200	Terpenuhinya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun



2	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1000 SR	1369 SR	137	Terpenuhinya Penyediaan Air Minum Bagi Masyarakat
3	Jumlah Sambungan Rumah	1000 SR	1369 SR	137	Terpenuhinya Sambungan Rumah

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sanitasi dan MCK untuk mewujudkan permukiman lingkungan yang sehat.

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	790 RT	1205 RT	152	Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase bertujuan untuk menangani saluran drainase kawasan yang terhubung langsung dengan sungai baik kegiatan pembangunan/peningkatan atau rehabilitasi saluran drainase perkotaan.



- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah paket pembangunan saluran drainase	5 paket	2 paket	40	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

5. Program Pengembangan Permukiman

Program Pengembangan Permukiman memiliki misi untuk meningkatkan akumulasi kawasan permukiman yang tertata dan kawasan perumahan yang layak huni.

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah paket pembangunan infrastruktur	10 paket	8 paket	80	Tertatanya kawasan permukiman

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan gedung/ fasilitas umum sesuai standar teknis dan teknologi.

- Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli	100 Dokumen	40 Dokumen	40	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta



	(TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				Implementasi SIMBG
--	--	--	--	--	--------------------

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu sub Penataan Bangunan dan Lingkungan.

- Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan lingkungannya di daerah kab/kota

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah paket kegiatan penataan bangunan dan lingkungannya	20 paket	11 paket	55	Tertatanya bangunan dan lingkungannya

8. Program Pengembangan Perumahan

- a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	2 Unit Rumah	40	Terpenuhinya Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
2	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1 Kegiatan	-	-	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana



9. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni	30 Unit	37 Unit	123	Terpenuhinya Rumah Baru Layak Huni

10. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menitikberatkan pada kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh.

- Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	22 Unit	26 Unit	118	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menitikberatkan pada kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian. Prasarana dan sarana utilitas umum meliputi kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan lingkungan, rumah ibadah, penerangan jalan umum dan ruang terbuka non hijau.



- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

No	Output (keluaran)	Target	Realisasi	%	Outcome (Hasil)
1	Jumlah PSU Terbangun	10 Paket	15 Paket	150	Tersedianyan PSU Terbangunan



3.2.2 CAPAIAN TARGET RPD

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pidie tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman dan infrastruktur pelayanan dasar	1. Persentase pembangunan rumah layak huni	1%	1,94%	194%
	2. Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0,6%	-	-
	3. Persentase tertanganinya saluran drainase dalam kondisi baik	3%	2%	66%
	4. Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	5%	1%	20%
	5. Persentase kawasan permukiman yang tertata	5%	0,1%	2%
	6. Persentase Rumah tinggal dengan sanitasi layak	1%	0,9%	90%
	7. Persentase rumah tangga dengan air minum layak	2%	1,04%	52%



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air minum, air bersih/sumur bor untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat wajib dipenuhi, seperti air minum, masak, mandi, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals /SDGs*).

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan berfokus pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/kota. Pada tahun 2023 telah melakukan Pengembangan Jaringan Distribusi dan sambungan rumah di 18 desa.

Target capaian persentase rumah tangga dengan air minum layak tahun 2023 sesuai dengan target RPD tahun 2023 adalah sebesar 2% dari jumlah rumah 129.738 unit = 2595 unit. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, alokasi anggaran Pengelolaan dan Pengembangan SPAM tahun 2023 dengan nilai pagu sebesar Rp. 9.990.352.199,- nilai kontrak sebesar Rp. 9.594.073.915,- dengan realisasi sebesar 97,2%.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sanitasi dan MCK untuk mewujudkan permukiman lingkungan yang sehat. Dibawah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan berfokus pada sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan sub sistem pengolahan setempat. Pada tahun 2023 telah melakukan kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di 19 desa Kab. Pidie. Alokasi anggaran pada program tersebut sebesar Rp. 11.577.152.062,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.562.010.825,- atau 99,8%.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan



kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase bertujuan untuk menangani saluran drainase kawasan yang terhubung langsung dengan sungai baik kegiatan pembangunan/peningkatan atau rehabilitasi saluran drainase perkotaan. Alokasi anggaran pada program tersebut sebesar Rp. 404.124.414,- dengan realisasi sebesar Rp. 403.760.414,- atau 99,9%.

4. Program Pengembangan Permukiman

Program Pengembangan Permukiman memiliki misi untuk meningkatkan akumulasi kawasan permukiman yang tertata dan kawasan perumahan yang layak huni. Program Pengembangan Permukiman memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 8.274.413.796,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.252.380.322,- atau 99,6%.

5. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan gedung/ fasilitas umum sesuai standar teknis dan teknologi. Program Penataan Bangunan Gedung memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan pagu anggaran Rp. 198.050.456,- dan realisasi Rp. 197.420.456,-

Kendala Yang dihadapi dalam Program ini adalah belum adanya pendataan bangunan gedung, belum adanya sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung, dan belum optimalnya peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung.

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu sub Penataan Bangunan dan Lingkungan. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.432.586.242,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.418.272.142,- atau 99,51%.



7. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menitikberatkan pada kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh. Pada tahun ini melaksanakan bantuan peningkatan Kualitas Rumah dan pembangunan baru dengan pagu anggaran Rp. 2.014.202.910,- dan realisasi sebesar Rp. 2.007.412.910,-.

8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menitikberatkan pada kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian. Prasarana dan sarana utilitas umum meliputi kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan lingkungan, rumah ibadah, penerangan jalan umum dan ruang terbuka non hijau.

Pada tahun 2023 program ini memiliki jumlah pagu Rp. 5.032.613.016,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.033.042.575,- atau 99,4%.



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie pada tahun 2023 tertuang didalam DPA Nomor : DPA-SKPD/A.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 05 Januari 2023 dan DPPA-SKPD Nomor: DPPA/B.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 02 November 2023, dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.881.305.246,- dan DPPA Nomor: DPPA/B.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 31 Oktober 2022, dengan alokasi dana sebesar **Rp. 51.548.895.600,-**. Realisasi fisik sebesar 97,86% dan realisasi keuangan sebesar 94.81% dengan jumlah dana yang telah terserap sebesar Rp. 50.421.309.488,-.

Adapun rincian belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Aparatur (Belanja Tidak Langsung/Gaji) sejumlah **Rp.3.736.825.388,-** (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- b. Belanja Langsung/Pelayanan Publik sejumlah **Rp. 46.684.484.100,-**. (Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).

Terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.127.586.112,-** (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*). Sisa anggaran ini berasal dari pagu sisa kontrak, perjalanan dinas dan makan minum rapat.

Realisasi anggaran sampai dengan Desember Tahun 2023 adalah **50.421.309.488,-** atau sebesar **97,81%**, tersaji dalam tabel berikut:



C. TARGET DAN REALISASI KEUANGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.428.734.633	5.793.755.057	91,08	91,88
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.139.216	17.739.216	72,22%	62,50%
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.050.000	3.600.000	88,89%	50%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.524.176	5.524.176	100%	100%
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1.950.000	-	0%	0%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	8.615.040	8.615.040	100%	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.245.145.273	3.736.825.388	93,83%	96,16%
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.115.965.273	3.607.645.388	87,65%	92,31%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.180.000	129.180.000	100%	100%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.362.386	30.362.386	100%	100%
	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	30.362.386	30.362.386	100%	100%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.506.489	48.506.489	100,00%	100,00%
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	23.089.000	23.089.000	100%	100%
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	16.909.799	16.909.799	100%	100%
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	8.507.690	8.507.690	100%	100%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	876.998.202	799.516.018	94,62%	98,21%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.490.743	1.490.743	100%	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.988.600	3.800.000	95%	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	212.185.103	207.185.911	97,64%	87,5%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.870.756	11.870.756	100%	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.220.000	92,50%	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	421.768.000	377.883.776	89,60%	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	223.295.000	195.064.832	87,36%	100%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.811.880	74.200.000	86,47%	86,47%
	Pengadaan Mebel	85.811.880	74.200.000	86,47%	86,47%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	994.873.587	963.318.960	95,72%	91,67%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	Penyediaan jasa surat menyurat	13.416.030	12.141.030	90,50%	66,67%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	412.983.910	383.449.930	92,85%	100%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	153.913.647	153.200.000	99,54%	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	414.560.000	414.528.000	99,99%	100%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	126.897.600	123.286.600	85,82%	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	79.440.000	79.386.000	99,93%	100%
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan	5.900.000	3.300.600	55,94%	100%
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	34.720.000	34.600.000	99,65%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	6.837.600	6.000.000	87,75%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.990.352.199	9.594.073.915	96,45%	97,22%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.990.352.199	9.594.073.915	96,45%	97,22%
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM.	650.000.000	633.426.000	97,45%	100%
	Pembangunan spam jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	5.443.498.199	5.218.199.199	95,86%	100%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.896.854.000	3.742.448.716	96,04%	91,67%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.577.152.062	11.562.010.825	99,87%	100%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.577.152.062	11.562.010.825	99,87%	100%
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	11.577.152.062	11.562.010.825	99,87%	100%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	404.124.414	403.760.414	99,91%	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	404.124.414	403.760.414	99,91%	100%
	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan	404.124.414	403.760.414	99,91%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8.274.413.796	8.252.380.322	99,62%	100%
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.274.413.796	8.252.380.322	99,62%	100%
	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan	7.420.322.986	7.402.695.262	99,76%	100%
	Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis	854.090.810	849.685.060	99,48%	100%
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	198.050.456	197.420.456	99,68%	100%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	198.050.456	197.420.456	99,68%	100%
	Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	198.050.456	197.420.456	99,68%	100%
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.432.586.242	3.418.272.142	99,51%	100%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.432.586.242	3.418.272.142	99,51%	100%
	Supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan	382.007.682	379.782.682	99,42%	100%
	Penataan bangunan dan lingkungan	3.050.578.560	3.038.489.460	99,60%	100%
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	357.815.872	355.023.872	99,74%	100%
	PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	357.815.872	355.023.872	99,74%	100%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	357.815.872	355.023.872	100%	100%
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	3.076.060	3.076.060	100%	100%
	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	1.968.994	1.968.994	100%	100%
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	352.770.818	349.978.818	99,21%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.838.850.000	3.834.157.000	99,88%	100%
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.838.850.000	3.834.157.000	99,88%	100%
	Pembangunan rumah baru layak huni	3.838.850.000	3.834.157.000	99,88%	100,00%
10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.014.202.910	2.007.412.910	99,66%	100%
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.014.202.910	2.007.412.910	99,66%	100%
	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	2.014.202.910	2.007.412.910	99,66%	100%
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.032.613.016	5.003.042.575	99,41%	100%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.032.613.016	5.003.042.575	99,41%	100%
	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	5.032.613.016	5.003.042.575	99,41%	100%
Total		51.548.895.600	50.421.309.488	97,81	97,86

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu bentuk kongkrit pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan dan pelaksanaannya dalam periode 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Organisasi Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan uraian dan analisis pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie untuk tahun 2023 secara keseluruhan dapat dikatakan **Sangat Berhasil** dengan capaian realisasi 97,81% dari segi penyerapan Anggaran yang ada.

Dalam upaya pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie Tahun 2023 dengan memberdayakan semua aspek sumber daya yang ada terutama upaya kerja keras seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie dalam melakukan berbagai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie Tahun 2023 kami sampaikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.



REFERENSI

1. Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pidie
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pidie
3. RFK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pidie Tahun 2023
4. BPS, Pidie dalam Angka 2022

